

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:
Yubiharto
E-mail: hyubi@yahoo.co.id
STIE Taman Siswa Banjarnegara

ABSTRACT

This research entitled "Analysis of Factors Affecting Compliance Level of Land and Building Taxpayer in Karanglewas Banyumas Regency". This study aims to determine whether the factors of taxation knowledge, delivery of SPPT, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance and to know the variables that have the greatest influence on taxpayer compliance level. This study uses primary data in the form of answers from respondents. Population in this research is taxpayer of Earth and Building in Karanglewas Sub-district of Banyumas Regency, taking sample by using proportional random sampling. Data analysis in this study using multiple linear regression analysis tools using SPSS 16 software. The result of research indicate that tax knowledge factor and SPPT delivery have a significant positive effect to taxpayer compliance of Land and Building, while taxation sanction variable has significant negative effect and variable which has the biggest influence is tax knowledge factor.

Keywords: *Taxpayer compliance, taxation knowledge and tax sanctions.*

Penelitian ini berjudul ” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban dari responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, pengambilan sampel dengan menggunakan proporsional random sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh negatif signifikan dan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar adalah faktor pengetahuan perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara. Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta masyarakat dalam rangka gotong-royong dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu kontributor terbesar dari APBN yang perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi. Terhitung mulai tanggal 1 januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan dipungut dan dikelola oleh daerah. Terjadi pengalihan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi sampai penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan dari Pemerintah Pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan memudahkan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan pelayanan pajak.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Karena kesadaran dan kepatuhan merupakan faktor yang penting bagi proses penerimaan pajak sehingga perlu dikaji secara intensif mengenai kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, dkk (2015) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, dkk (2014) hasil pengujiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku Wajib Pajak untuk mematuhi perpajakan.

Penelitian Yusnidar, dkk (2015) menyimpulkan bahwa variabel SPPT secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permata (2014) menghasilkan bahwa penyampaian SPPT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Penyampaian SPPT yang terlambat dapat menghambat wajib pajak yang ingin membbayar pajak tepat waktu.

Penelitian Yusnidar, dkk (2015) menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan sanksi pajak sebagai variabel yang memiliki pengaruh yang dominan dibanding dengan vvariabel lainnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Permata, dkk (2014) menghasilkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB . Sanksi pajak merupakan denda yang diberikan wajib pajak karena ketidakpatuhannya dalam membayar pajak. Sanksi yang ringan membuat wajib pajak lalai dalam membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengevaluasi beberapa faktor yang kemungkinan dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Untuk itu penulis membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penyampaian SPPT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada WP PBB-P2 Kecamatan Karanglewas, Banyumas).

Identifikasi masalah

Berdasar latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah penyampaian SPPT perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyampaian SPPT perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Untuk mendukung penelitian yang sudah ada dan sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan tersebut.
2. Manfaat Praktis
Dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang perpajakan dan referensi bagi pembaca yang membutuhkan. Untuk mengingatkan wajib pajak bahwa membayar pajak bumi dan bangunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi untuk kelangsungan pembangunan negara.

Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Tinjauan Literatur

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikembangkan oleh Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. *Theory of Planned Behavior (TPB)* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi dari dalam wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menambah pengetahuan wajib pajak, kemudian penyampaian SPPT dan adanya sanksi pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1989), kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan dibidang perpajakan yang masih dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti, dkk (2014) yang juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dengan

beberapa variabel yaitu sikap wajib pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku, kualitas pelayanan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

3. Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep pengetahuan wajib pajak menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pendapatan Kabupaten Banyumas terlebih bagi setelah adanya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah yang dulu hanya 64% sekarang menjadi 100%. Selain pengetahuan mengenai fungsi, kewajiban serta hak wajib pajak juga perlu mengetahui tentang mekanisme dan tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas/bank yang ditunjuk pemerintah daerah untuk bekerjasama. Pada umumnya semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan karena mereka juga mengetahui apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka akan terkena sanksi atau denda.

4. Penyampaian SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT menurut Yusnidar, dkk (2015) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang harus dibayarkan berdasarkan data obyek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.

Wajib Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan akan mendapatkan SPPT di kantor kelurahan tempat obyek pajak terdaftar dan tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat penyedia SPPT bagi wajib pajak. Pembayaran PBB-P2 yang tertera dalam SPPT dapat dilaksanakan di bank atau Giro yang tercantum dalam PPT atau pemungut PBB-P2 yang telah ditunjuk resmi oleh inas Penempatan Pengelolaan dan Aset Daerah.

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Sanksi dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan membayar sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara berupa bunga, denda atau kenaikan. Oleh karena itu semakin baik persepsi wajib pajak mengenai sanksi dan hukum pajak maka tingkat kepatuhan perpajakan semakin tinggi (Widiastuti, dkk 2014).

Pengembangan Hipotesis

1. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang memiliki faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penulis sajikan dalam bentuk rangkuman sebagai berikut:

- a. Widiatuti, dkk (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P2). Dengan variabel sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol berperilaku, kesadaran, pengetahuan, pelayanan pajak menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil bahwa sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol berperilaku, kesadaran, pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Namun untuk variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
- b. Yusnidar, dkk (2015) pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan variabel SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- c. Inka Kusuma (2014), Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan variabel pelayanan, penapatan, penyampaian SPPT, penyuluhan dan sanksi dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil bahwa pelayanan, pendapatan, penyuluhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun untuk variabel penyampaian SPPT dan sanksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu objek (Kusrini, 2006). Dari definisi tersebut maka konsep dari pengetahuan pajak yaitu suatu sikap pola pikir atau pemahaman seseorang terhadap pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Yusnidar, dkk (2015) memperoleh hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada umumnya tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak demikian pula sebaliknya semakin rendah pengetahuan maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Penyampaian SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang harus dibayarkan. SPPT diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang adapada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.

Penelitian mengenai pengaruh penyampaian SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Yusnidar, dkk (2015) memperoleh hasil bahwa penyampaian SPPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SPPT adalah item pokok dari pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga apabila terjadi kesalahan pada saat penyampaian akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

H2: Penyampaian SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

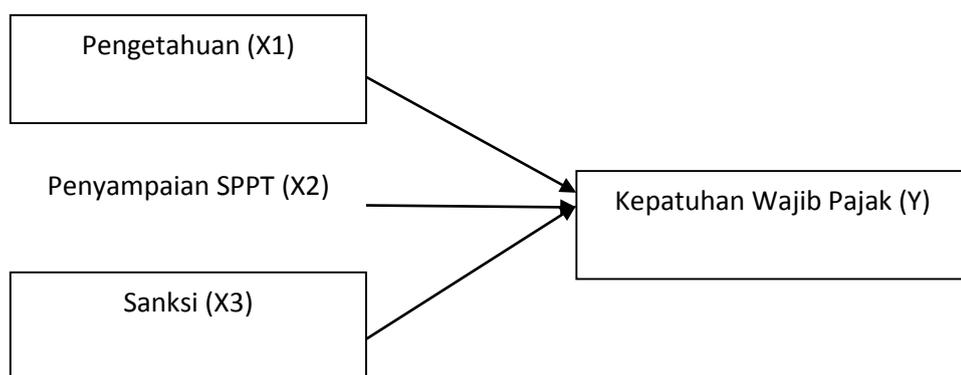
Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2003). Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Johan Yusnidar, dkk (2015) memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi seharusnya wajib pajak merasa sungkan untuk melanggar aturan perpajakan karena setiap wajib pajak yang melanggar akan dikenai sanksi atau hukuman baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

H3 : Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Model penelitian

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam individu maupun luar individu. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, proses penyampaian SPPT dan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak. Adapun untuk kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatori (*Explanatory Research*). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survey.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Karanglewas, Banyumas.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Karanglewas.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Karanglewas yang berjumlah 83.538 wajib pajak. Sedangkan metode pengambilan sampel digunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Populasi

e : Standar Error (prosentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan)

Jumlah wajib pajak yang dijadikan sampel, adalah berjumlah 73.437, dan jika digunakan rumus Slovin dengan standar error sebesar 10% maka diperoleh jumlah responden sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{83.538}{1 + (73.437)(0,1)^2} \\ &= \frac{83.537}{835,37} \\ &= 99,86 \text{ (dibulatkan 100)} \end{aligned}$$

Sumber data

Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberi keterangan, dalam hal ini adalah wajib pajak di Kecamatan Karanglewas yang kami ambil sebanyak 100 responden.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data – data dalam penelitian ini penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi Sistematis

Observasi ini merupakan pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap keadaan – keadaan yang sesungguhnya terjadi, dengan membawa scope observasi secara tegas sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Wawancara dan Interview

Wawancara dan interview merupakan pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden, wawancara yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan kerangka atau pokok – pokok pertanyaan yang diajukan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini merupakan tehnik pengumpulan data dengan mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku – buku perpustakaan, peraturan – peraturan

perundang – undangan dan bahan pustaka lainnya, baik yang di dapat di lokasi maupun di tempat lainnya.

6. Definisi Operasional terhadap variabel yang digunakan

Untuk definisi operasional, disini ada tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk lebih jelas dalam pengukuran variabel tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, memahami cara menghitung pajak dan tata cara pembayaran serta batas waktu pembayaran pajak. Variabel diukur dengan skala likert 1–5 poin untuk 7 pertanyaan.

b. Penyampaian SPPT.(X2)

Penyampaian SPPT adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk mengingatkan wajib pajak. Variabel diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 6 pertanyaan.

c. Sanksi Pajak (X3)

Yang dimaksud sanksi pajak disini adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 5 pertanyaan.

e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Yaitu memasukkan, melaporkan, mengisi dengan benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak tepat waktu tanpa ada pemaksaan. Variabel diukur dengan skala likert 1-5 pon untuk 8 pertanyaan.

B. Tehnik Analisis Data

Setelah data – data yang penulis peroleh melalui pengumpulan data sebagaimana diterangkan di atas, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang selanjutnya diproses atau dikerjakan sehingga dapat menampilkan kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang telah diajukan dalam penelitian.

Adapun pengolahan data tersebut ditempuh dengan cara sebagai berikut :

a. Editing

Editing yaitu mengoreksi atau meneliti kembali jawaban – jawaban yang telah diberikan oleh responden.

b. Tabulasi

Tabulasi ini dengan tujuan untuk memproses perhitungan frekwensi pada masing – masing kategori, yang selalu disajikan dalam bentuk tabel.

c. Pembuatan Tabel

Dalam pembuatan tabel ini jalan menyajikan hasil tabulasi ke dalam tabel – tabel atas pertanyaan yang diajukan kepada responden menurut kategori jawaban dengan memasukkan jumlah frekwensi dan selanjutnya dipakai sebagai kerangka analisa.

Selanjutnya sebelum diregres dilakukan uji asumsi klasik sbb:

1. Asumsi Klasik

Asumsi klasik digunakan untuk menghasilkan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimator* atau BLUE).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Salah satu cara mengetahui normalitas secara visual yaitu menggunakan

Norma P-P Plot. Jika titik-titik yang tersebar masih berada tidak jauh atau disekitar garis diagonal maka dapat dikatakan memiliki distribusi data normal

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi akan terjadi apabila antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu saling berkorelasi. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Konsekuensinya adalah adanya autokorelasi dalam model regresi adalah varians sampel tidak dapat menggunakan varian populasinya dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat untuk menaksir variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dilaksanakan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji DW) dengan melihat pada tabel DW (Gujarati, 1998).

c. Multikolinieritas

Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya multikolinieritas akan sangat sulit memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel bergantungnya atau dengan kata lain akan sangat sulit untuk mengetahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel tergantungnya. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas ini dilihat dari nilai VIF.

Jika nilai $VIF \leq 5$ maka tidak terjadi multikolinieritas

Jika nilai $VIF > 5$ maka terjadi multikolinieritas.

d. Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas digunakan apabila varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Diagnosa adanya heteroskedasitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan uji Glesjer (Glesjer test). Uji Glesjer dilakukan dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai absolut residual (e), sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen. Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam alpha ($0,05$), maka dalam model tidak terjadi heteroskedasitas.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi linier berganda dipilih karena teknik ini dapat menyimpulkan secara langsung mengenai masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-sama.

Dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Penyampaian SPPT

X3 = Sanksi Perpajakan

Lnb3 = Koefisien regresi luas lahan

e = Standar Error

3. Uji – F

Analisa Uji-F untuk menguji ketepatan model penelitian dengan Langkah – langkah pengujian :

1) Komposisi Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya Model penelitian tidak layak

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya Model penelitian layak

- 2) Level of signifikan = 0,05
- 3) Nilai F tabel = F 0,05 ; (k-1); (n – k)
- 4) Nilai F hitung

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R = Koefisien determinasi

k = Banyaknya variabel

5) Kriteria Keputusan

Ho diterima apabila nilai F hitung \leq F tabel

Ho ditolak apabila nilai F hitung $>$ F tabel

4. Uji t

a) Komposisi Hipotesis

Ho : $\beta = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent

Ha : $\beta \neq 0$, artinya ada pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent

b) Level of signifikan 0,05

- Nilai t tabel = $t_{\alpha/2} : (n - k)$

- Kriteria Pengujian

Ho diterima apabila $-t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel} \geq t \text{ hitung}$

Ho ditolak apabila $-t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

- Mencari t-hitung

$$\text{Menghitung nilai } t = \frac{b_j}{S_{b_j}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

b_j = Koefisien regresi

S_{b_j} = Standar Error Regresi

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Karanglewas

1. Letak Geografis

Karanglewas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah sekitar 3.248 Km² yang terdiri dari 13 Desa Sebagian tanahnya adalah bergelombang dan sebagian besar merupakan tanah kering, sehingga daerah ini cocok untuk perkebunan dan tanaman kayu-kayuan. Kecamatan Karanglewas merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kabupaten Banyumas, terletak di bagian barat dari Kabupaten Banyumas. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten yang membawahnya sekitar 6 Kilometer dan terletak pada ketinggian 320 meter dari permukaan laut.

Diskripsi Responden

Berdasarkan data yang terkumpul dari responden penelitian di Kecamatan Karanglewas terhadap wajib pajak sebanyak 100 responden, berikut gambaran umum responden menurut jenis kelamin.

Tabel: 1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| Laki-laki | 65 | 65% |
| Perempuan | 35 | 35% |
| Jumlah | 100 | 100% |

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebesar 65%, sedangkan perempuan hanya 35

Sedangkan gambaran umum responden dilihat dari usia dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel: 2
Responden Berdasarkan Usia

| Kelompok Usia | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------|----------------|
| 20 - 30 tahun | 13 | 13% |
| - 40 tahun | 37 | 37% |
| 41 - 50 tahun | 20 | 20% |
| > 50 tahun | 30 | 30% |
| Jumlah | 100 | 100% |

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian responden berusia antara 31 tahun sampai 40 tahun yaitu sebanyak 37 orang atau sebesar 37%.

Sedangkan apabila responden dilihat dari pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel: 3
Responden Berdasarkan Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------------|--------|----------------|
| SD | 41 | 41% |
| SMP | 36 | 36% |
| SMA | 20 | 20% |
| D3 | 1 | 1% |
| S1 | 2 | 2% |
| Jumlah | 100 | 100% |

Berdasarkan tabel 3 di atas sebagian besar responden adalah berpendidikan SMP yaitu sebesar 36%, dan yang berpendidikan sarjana hanya ada 2 yaitu sebesar 2%.

Diskripsi Variabel

Analisa ini didasarkan pada jawaban responden sebanyak 100 responden. Berikut disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian yang disajikan dalam tabel 4. Dari tabel tersebut dapat diketahui informasi tentang rata-rata dan deviasi standar dari jawaban responden mengenai variabel penelitian, Berdasarkan tabel 4. dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel: 4
Statistik Diskriptif Variabel penelitian

| | H | Minimum | Maximum | Mean | Std Deviation |
|------------------------|-----|---------|---------|--------|---------------|
| Pengetahuan Perpajakan | 100 | 1,81 | 5,00 | 4,0771 | 0,51465 |
| Penyampaian SPPT | 100 | 2,73 | 4,83 | 4,0017 | 0,45226 |
| Sanksi Perpajakan | 100 | 2,02 | 5,00 | 4,0740 | 0,57183 |
| Kepatuhan WP | 100 | 3,22 | 5,00 | 4,0313 | 0,43132 |
| Valid N | 100 | | | | |

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan jawaban minimum responden sebesar 1,71 dan maksimum sebesar 5,00 dengan rata-rata sebesar 4,0771 dan standar deviasi 0,51465. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang pengetahuannya sangat kurang mengenai perpajakan.

Variabel penyampaian SPPT di Kecamatan Karanglewas sudah cukup efektif, hal ini ditunjukkan dengan jawaban minimum sebesar 2,83 dan maksimum sebesar 4,83 dengan rata-rata 4,0017.

Variabel sanksi perpajakan jawaban minimum responden sebesar 2,00 dan maksimum sebesar 5,00 dengan rata-rata sebesar 4,0740 dan standar deviasi 0,57183. Berdasarkan distribusi jawaban, sanksi perpajakan di Kecamatan Karanglewas sudah cukup baik.

Dari hasil distribusi jawaban, kepatuhan wajib pajak di Kecamatan karanglewas sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban minimum responden sebesar 3,12 dan maksimum sebesar 5,00.

Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji Normalitas, uji multikolinieritas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dan *tolerance value*, serta uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejer antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

a. Uji Normalitas

Sebelum dilakukan analisis data dengan metode regresi linier berganda, data yang diperoleh terlebih dahulu diuji normalitas. Metode uji normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov Smirnov*. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 7, dan secara ringkas ditunjukkan dalam tabel 5.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui hasil uji normalitas semua variabel *berdistribusi* normal yaitu nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan semua variabel berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bernilai kurang dari 5 dan nilai *Tolerance* kurang dari 1. Sehingga semua variabel bebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa $\text{sig} > \alpha$ dengan α 0,05. Variabel produksi dengan nilai $\text{sig} 0,223 > 0,05$, variabel pengalaman nilai $\text{sig} 0,193 > 0,05$, variabel

luas lahan nilai sig 0,120>0,05 dan variabel kredit nilai sig 0,306>0,05. Dengan demikian semua variabel mempunyai nilai sig>alpha jadi antara variabel independen tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model ini.

2. Analisis Regresi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penyampaian SPPT, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Melalui perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,818 atau 81,8 persen. Artinya bahwa 81,8 persen naik turunnya variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT, dan sanksi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 18,2 persen dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam model.

3. Pengujian Model

Untuk menguji model penelitian yang diajukan menggunakan uji F, dan berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Uji F

Tabel: 9
Hasil Analisis Uji F

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 9.725 | 3 | 3,225 | 32,624 | ,000 ^a |
| | Residual | 7.486 | 96 | 0.598 | | |
| | Total | 121221 | 99 | | | |

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, penyampaian SPPT, sanksi perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib pajak

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > nilai F_{tabel}$ atau berada pada daerah penolakan H_0 . Dan signifikansi $0,00 < 0,05$ sehingga model penelitian tersebut layak dan bisa digunakan untuk analisis selanjutnya

b. Uji t

Untuk menguji pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial digunakan uji t, berikut hasil analisis untuk uji secara parsial:

Tabel: 10
Hasil Analisis Uji t

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1,601 | ,984 | | 16,498 | ,000 |
| | Pengetahuan Perpajakan | ,327 | ,089 | ,332 | 5,147 | ,000 |
| | Penyampaian SPPT | ,431 | ,098 | ,450 | 4,336 | ,000 |
| | Sanksi Pajak | -,436 | ,097 | ,017 | -0,430 | ,599 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 5,147 (Sig. = 0,000). Nilai t tabel dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$ diperoleh $T_{\text{tabel}} = 1,986$. Jadi t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga hipotesis pertama diterima

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung variabel Penyampaian SPPT sebesar 4,336 (Sig. = 0,00). Nilai t tabel dengan tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 0,05$ diperoleh $t_{\text{tabel}} = 1,986$. Jadi t_{hitung} lebih kecil dari t tabel, sehingga hipotesis diterima kedua

Nilai t_{hitung} variabel Sanksi Pajak sebesar -0,430 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,599. Dari hasil analisis dengan menggunakan tingkat kesalahan (α) = 0,05 diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,986. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, sehingga t hitung variabel Sanksi Perpajakan berada di daerah penolakan H_0 . Sehingga hipotesis ketiga ditolak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT dan sanksi pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima hal ini dibuktikan dengan tingkat sig 0.00 lebih kecil dari 0,05
2. Hipotesis kedua yang menyatakan penyampaian SPPT mempunyai pengaruh yang signifikan diterima, hal ini dibuktikan dengan hasil sig 0.00 lebih kecil dari 0,05
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak, hal ini dapat dilihat dari nilai sig sebesar 0.599 lebih besar dari 0,05

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar pajak sebagai Variabel Interwening (Studi Kasus WPOP yang melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas Diponegoro.
- Agung Dwi Prabowo, 2015. Efektifitas Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi pada kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Tondano Vol 3 No.1 Maret 2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi manado.
- Danang Sanyoto, 2013. Metode dan Instrumen Penelitian, CAPS, Yogyakarta
- E.Surya Darma dan Agus Tri basuki, 2015. Statistika Aplikasi pada Ekonomi, Bisnis dan Penelitian, Danisa Media, Yogyakarta.
- Hana Pratiwi Burhan, 2015. Pengaruh Sosialisasi, Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilham Koentarto, 2011, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol 3, No.2 Hal.243-248.
- Johan Yusnidar, Sunarti dan Anik Prasetya, 2015. Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran PBB-P2, Jurnal Perpajakan, Vol.1 No.1 bulan Januari.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 2013. Modul Perpajakan, Penerbit kanwil DJP Jawa Tengah II, Surakarta.
- Siti Masruroh dan Zulaikha, 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Empiris pada WPOP di kabupaten Tegal). Diponegoro Journal of Accounting Volume 2, No.4.
- Siti Resmi, 2009. Perpajakan: Teori dan kasus: Edisi Keempat. Salemba Empat, jakarta.
- Salud Kahono, 2003, pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB (Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang) Tesis pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.